



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM KOMUNIKASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI PURNAMA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 641702

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.285.000.000
1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
 2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 525.000.000
 3. Tanah Seluas 6090 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
 4. Tanah Seluas 4990 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 476.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
 2. MOBIL, HONDA HRV JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
 3. MOBIL, FORD ECOSPORT MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
 4. MOBIL, SUZUKI BALENO MICRO/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 30.000.000
- D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----
- E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 170.192.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.961.192.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.961.192.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.